

RENJA 2024

RENCANA KERJA



**DINAS TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN NUNUKAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas perkenan-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Tahun dapat kami selesaikan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implemenetasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan dan Renstra Perubahan SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi daerah.

Renja ini merupakan penjabaran pelaksanaan dari Renstra Perubahan Disnakertrans Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Renja ini memuat Program dan Kegiatan serta evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan masyarakat.

Nunukan, 20 Februari 2023
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Nunukan



ABDUL MUNIR, ST, M.A.P
NIP. 19721130 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
.	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	26
3.3 Program dan Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB V PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	7-11
.....		
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2021	15
.....		
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	19-23
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022	24
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022	27-30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi sebagai penjabaran perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2043 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perubahan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2021-2026. Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang antara lain:

- a. Program dalam Renja harus sesuai dengan program Prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Perubahan;
- b. Program dan Kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan Program dan Kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;

- c. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2024, Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 yang telah mengakomodir Usulan Hasil Musrenbang dari tiap Kecamatan di Kabupaten Nunukan.

1.3.2 Tujuan

Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan SKPD dan RPJMD Perubahan Kabupaten Nunukan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. LatarBelakang
2. LandasanHukum
3. Maksud danTujuan
4. SistematikaPenulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3. Program dan Kegiatan

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2021-2026, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan mempunyai tugas dalam pencapaian misi pertama “Mengakselerasi Peningkatan Infrastruktur Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Untuk Mendukung Pembangunan Agrobisnis Berwawasan Lingkungan”. Guna mendukung pencapaian misi tersebut, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan melaksanakan program sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJMD Perubahan dan dijabarkan pada kegiatan yang telah disusun pada Renstra Perubahan SKPD.

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Nunukan melaksanakan kegiatan dengan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 5,111,855,591,00, Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi Rp. 5,111,855,591,00 dengan rincian Belanja Pegawai Rp. 4,076,985,257,00 dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 1,000,515,834,00. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 4,937,922,723,00 (96,60%) dengan rincian untuk belanja pegawai Rp. 3,959,189,488,00 (97,11%) belanja barang dan jasa Rp. 944,384,287,00 (94,39%).

Target belanja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)
BELANJA DAERAH	Rp. 5,194,656,591,00	Rp. 5,018,137,983,00	96,60
BELANJA OPERASI	Rp.5,111,855,591,00	Rp.4,937,922,723,00	96,60
• Belanja Pegawai	Rp. 4,076,985,257,00	Rp. 3,959,189,486,00	97,11
• Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1,000,515,834,00	Rp. 944,384,287,00	94,39
• Belanja Bantuan sosial	Rp. 34,354,500,00	Rp. 34,348,950,00	96,88
• Belanja Modal	Rp. 82,801,000,00	Rp. 80,215,260,00	96,88

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2022
(yang mendukung capaian sasaran strategis)*

NO	PROGRAM	ANGGARAN*			KET
		MURNI	PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	5,173,000	5,173,000	2,930,000	
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	87,734,000	87,734,000	73,932,735	
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	11,687,000	11,687,000	11,409,000	
3	Program Hubungan Industrial	46,669,550	46,669,550	45,624,450	
4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	14,528,200	14,528,200	13,675,200	
5	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	61.724,550	61.724,550	55,201,000	
JUMLAH		127,516,300	127,516,300	42.834.200	

Realisasi anggaran untuk Program/Kegiatan utama sebesar Rp.42,834,200 dari anggaran yang tersedia Rp. 127,516,300

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021, capaian Rencana Kerja Tahun 2022 (tahun n-1) dan capaian target Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Nunukan

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024(Tahun Berjalan)				
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	<i>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja</i>												
2.01	01	15		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	-	100	100	100	100		
				Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Jumlah peserta pelatihan pencari kerja berdasarkan unit kompetensi	500 Org		520	100	100	520	570	100
2.01	01	15	06	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun n	500 Org	-	520	520	100	520	570	100

				kompetensi										
2.01	01	17		Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten / kota	43,00	%	-	11,55	11,55	100	11,55	11,55	100
				Pengelolaan informasi pasar kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui <i>job fair / bursa kerja</i>	1000	Org		50	50	100	50	50	100
				<i>Job Fair / Bursa Kerja</i>	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui <i>job fair / bursa kerja</i>	1000	Org		50	50	100	50	50	100
				Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten / kota	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	200	Org		200	200	100	200	200	100
				Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI)/pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	200	Org		150	200	100	200	250	100
				Program Hubungan Industrial	Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP,PKB,LKS,Biparti,Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS ketenaga kerjaan)	42,40	%		42,40	42,40	100	42,40	42,40	100

			Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	100 %	5	5	100	5	5	100
			Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	100 %	5	5	100	5	5	100
			Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten / kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	15 kasus	6	6	100	5	5	100
			Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten / kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	15 Kasus	6	6	100	5	5	100
<i>Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi</i>											

2.01	01	24		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan PTB (Pembangunan Transmigrasi Baru)	14,29	%	-	20	20	20,00	20	20	20,00
				Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten / kota	Cakupan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi	20	%		1	1	100	1	1	100
2.01	01	24	01	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	21,77	%		1	1	100	1	1	100
				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Presentase pengembangan kawasan transmigrasi	20	%		1	1	100	1	1	100
				Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah satuan permukiman transmigrasi	20	%		33,33	33,33	100	33,33	33,33	100
				Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Jumlah kepala keluarga transmigran yang dibina	200	kk		150	200	100	200	175	100
2.01	01	24	02	Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	1	Paket	-	1	1	100	1	1	100
				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										

				Administrasi Pemerintahan										
2.01	01	01		Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Sakip perangkat daerah	100	BB	-	100	100	100	100	100	100
				Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100	%		100	100	100	100	100	100
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	Dok		1	1	100	1	1	100
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	Dok		6	6	100	6	6	100
				Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	12	Bln		12	12	100	12	12	100
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	Bln		12	12	100	12	12	100
				Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	100	%		100	100	100	100	100	100

				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	14	Alat		1	1	100	1	1	100
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	65	Jenis		1	1	100	1	1	100
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	Bln		1	1	100	1	1	100
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	14	Kali		14	14	100	14	14	100
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	100	%		100	100	100	100	100	100
2.01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Bln		12	12	100,00	12	12	100,00
2.01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bln		12	12	100,00	12	12	100,00
2.01	01	01	06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	46	Orang		12	12	100,00	12	12	100,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	100	%		100	100	100	100	100	100

3.32	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Bln	-	10	10	100,00	10	10	100,00
3.32	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Alat	-	10	10	100,00	10	10	100,00
3.32	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Gdng	-	1	1	100,00	1	1	100,00

Dari tabel 2.1 diatas terlihat bahwa walaupun Program/Kegiatan Pendukung telah memenuhi target kinerja yang direncanakan namun Program/Kegiatan Utama tidak dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan maksimal. Tidak tercapainya target realisasi disebabkan oleh berbagai hal, antara lain:

- a) Berkurangnya pagu anggaran pada DPA masing-masing kegiatan dari pagu indikatif RENSTRA dan RENJA;
- b) Adanya pengurangan anggaran sehingga kegiatan yang sudah direncanakan pada anggaran murni tidak dapat dilaksanakan;
- c) Permohonan SPD yang tidak disetujui sehingga kegiatan yang tidak dipotong pun tidak dapat berjalan dengan maksimal;
- d) Khusus Program Peningkatan Kesempatan Kerja, rendahnya angka realisasi disebabkan oleh minimnya data tenaga kerja yang telah ditempatkan. Umumnya pencari kerja yang terdaftar tidak melapor kembali ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setelah ditempatkan/diterima bekerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan dua urusan, yaitu urusan wajib non pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan dan urusan bidang pilihan bidang transmigrasi. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan mempunyai tugas dan tanggung jawab cukup besar bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Nunukan dalam rangka pencapaian visi misi Kepala Daerah periode 2021-2026.

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pelayanan SKPD. Adapun realisasi kinerja pelayanan SKPD Tahun 2019-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2021

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Dinas Tenaga Kerja					Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.0 - 5.0%	-	7,24	6,74	6,24	5,74	5,24	3,91	4,14	4,00	0,04	
2	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	-	-	-	-	93,46	93,88	94,34	96,09	95,86	96,50	0,96	
3	Persentase Putus Kerja	-	-	-	-	4,47	4,28	4,10	0,45	2,74	2,00	1,50	
4	Presentase masyarakat transmigrasi yang mandiri	-	-	10	15	8	11	14	8,70	7,39	4,00	4,50	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penduduk dan tenaga kerja merupakan faktor yang menggerakkan proses pembangunan disamping sumber daya lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu krusialnya posisi tenaga kerja di dalam proses pembangunan sehingga permasalahan ketenagakerjaan harus mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu dari berbagai pihak.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan antara lain :

1. Terbatasnya lapangan kerja, sehingga banyak angkatan kerja yang tidak terserap;
2. Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja lokal, mengakibatkan kurangnya kompetensi dan daya saing menghadapi tenaga kerja dari luar;
3. Penganggur atau pencari kerja kurang memiliki kreatifitas dan inovasi-inovasi;
4. Minimnya perlindungan hukum tenaga kerja, sehingga banyak terjadi kasus perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja;
5. Pemberian upah yang belum sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketransmigrasian antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi;
2. Adanya permasalahan lahan transmigrasi;
3. Rendahnya tingkat kemandirian transmigran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, diantaranya adalah : tidak tersedianya tenaga fungsional pengantar kerja, masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, banyaknya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia

akibat ketidaksesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja.

Dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut, dapat diangkat sebagai isu strategis dengan kriteria berikut :

- a. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;
- b. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;
- c. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, dan meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial;
- d. Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi;
- e. Masih kurang maksimalnya pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan.

Sedangkan permasalahan menurut stakeholders :

1. Sektor ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi relatif belum didayagunakan secara maksimal;
2. Sinergitas modal sosial masyarakat bagi pembangunan belum maksimal;
3. Tingginya tingkat migrasi dan jumlah pendatang yang mengikuti pendidikan di Kabupaten Nunukan lulus sekolah tidak kembali ke daerahnya;
4. Kurang link and match-nya antara lulusan pendidikan formal dengan dunia kerja;
5. Penyerapan tenaga kerja lebih tinggi pada pekerja tidak tetap/outsourcing, berpotensi pada terjadinya pekerja kembali menjadi penganggur;
6. Tingginya pelanggaran norma kerja;
7. Kasus perselisihan hubungan industrial yang berlarut-larut.

Sesuai kondisi permasalahan di atas, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kualitas produktivitas pencari kerja, peluang kesempatan kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis, didukung dengan upaya pengawasan dalam penegakan supremasi hukum ketenagakerjaan di Kabupaten Nunukan yang dianggap belum maksimal, juga berdasarkan isu-isu strategis, maka perlu ditindaklanjuti dengan suatu rencana tindak berupa program dan kegiatan yang nyata, didukung dengan penyiapan landasan-landasan

teknis dan operasional secara bertahap dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkelanjutan, disusunlah program-program sebagai berikut:

- Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Peningkatan Kesempatan Kerja;
- Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
- Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Renstra SKPD, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan mengajukan 5 program, 11 kegiatan, 19 sub kegiatan pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang tenaga kerja, dan 2 program, 2 kegiatan, 3 sub kegiatan pada urusan bidang transmigrasi.

Berikut review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2024 :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Nunukan

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODEFIKASI					NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PD PENANGGUNG JAWAB
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan							
1						2	3	4	5	6	7	8
	02						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	02	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
							DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
	2	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	5,242,675,735.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	100%	31,324,650.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	5,999,950.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	6 Dokumen	25,324,700.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	12 Bulan	4,268,381,584.56		DISNAKERTRANS

	2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	4,268,381,584.56	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	100%	197,588,700.44		DISNAKERTRANS
	2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	14 Alat	25,555,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	65 Jenis	38,881,600.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	9,692,300.44	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	14 Kali	123,529,400.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	100%	688,439,800.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	12 Bulan	3,056,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan internet, rekening air dan listrik	12 Bulan	170,347,800.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa umum perkantoran	12 Bulan	515,036,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	100%	56,941,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa	10 Kendaraan	22,826,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS

						Dinas Jabatan	pemeliharaan dan perizinan				
	2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan jasa pemeliharaannya	10 Alat	14,565,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan jasa pemeliharaannya	1 Gedung	19,550,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	72%	179,115,600.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Presentase Peserta Pelatihan Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	72%	179,115,600.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja lulusan SMA/ sederajat yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	480 Orang	179,115,600.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana tenaga kerja daerah yang di susun	100%	17,000,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rencana tenaga kerja daerah 2022- 2027	1 Dokumen	17,000,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Rencana tenaga kerja daerah 2022- 2027	1 Dokumen	17,000,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan	40%	25,600,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pelayanan Informasi dan Bursa Kerja	12 Perusahaan	15,330,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pelayanan Informasi dan Bursa Kerja	12 Perusahaan	15,330,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS

	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan CPMI	200 Orang	10,270,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah perlindungan CPMI	200 Orang	10,270,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP,PKB, LKS Biparti, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS ketenagakerjaan)	9,41%	54,284,400.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan	1,96%	22,224,500.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah peraturan perusahaan yang di sahkan	5 perusahaan	22,224,500.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	2,75%	32,059,900.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus perselisihan HI yang selesai dengan perjanjian Bersama	7 Kasus	32,059,900.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	03					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	03	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
	03	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan PTB (Pembangunan transmigrasi baru)	14,29%	25,000,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS

	03	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan	25,000,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	03	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	1 Kawasan	25,000,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	03	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	jumlah bantuan prasarana dan sarana sosial	100%	110,065,300.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	03	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Cakupan Satuan permukiman Transmigrasi	1 Pemukiman	110,065,300.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	03	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah transmigrasi yang di fasilitasi penempatannya	200 KK	40,579,000.00	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS
	03	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	jumlah jenis bantuan prasarana dan sarana sosial	10 Jenis	69,486,300	Kab. Nunukan	DISNAKERTRANS

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pengusulan program dan kegiatan oleh masyarakat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Desa (Musrenbangdes) serta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan, dan Forum OPD Kabupaten Nunukan.

Dari proses tersebut, usulan program/kegiatan masyarakat mengarah kepada disepakatii urusan ketenagakerjaan pada 1 program yaitu :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Nunukan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		
	- Pelatihan menjahit - Pelatihan perbengkelan, menjahit, tata boga dan tata rias	Kab. Nunukan Tau lumbis Kec. Lumbis, Kab. Nunukan, Lumbis ogong, Tau lumbis		10 Orang 1 Paket	Usulan Musrenbang

Ket:

Biaya perjalanan dan akomodasi dari Kecamatan ditanggung sendiri

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang merupakan prioritas pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan antara lain tertuang dalam beberapa program yaitu:

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran:
 - a. Terlaksanannya pelatihan berbasis kompetensi
 - b. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan perusahaan.
2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan sasaran:
 - a. Tersedianya peluang kerja produktif diberbagai bidang usaha produktif
 - b. Terbangunnya layanan system informasi pasar kerja
3. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dengan sasaran:
 - a. Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untukanak
 - b. Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali kedunia pendidikan/memperoleh pelatihan keterampilan
 - c. Meningkatnya perlindungan kepada pekerja perempuan
 - d. Diterapkannya manajemen dan standarisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - e. Menurunnya jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
4. Program Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi dengan sasaran:

Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup dikawasan transmigrasi dalam rangka pembangunan pedesaan didaerah tertinggal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan Kebijakan Nasional serta berpedoman pada Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maka ditetapkan tujuan strategis Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan 2024 adalah :

1. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
2. Mengurangi tingkat pemutusan hubungan kerja;
3. Meningkatkan kemandirian warga transmigrasi.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran-sasaran Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas tenaga kerja
2. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja
3. Meningkatnya perlindungan terhadap hak dasar pekerja
4. Meningkatnya pembinaan warga transmigrasi

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 diatas maka ditetapkan Rencana Program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.3
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
 Kabupaten Nunukan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2															
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	07														
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
										309.947.500				340.436.355	
2	07	02												0	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														
														0	
2	07	02	2,01											0	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)														
														0	
2	07	02	2,01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro			0	0 Dokumen			0	0
														0	
2	07	03												188.071.380	197.027.160
	PROG RAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
2	07	03	2,01 P	elaksa	naan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi									188.071.380	197.027.160
2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan Kompetensi pada Tahun n			100%	520 Orang			188.071.380	570 Orang 197.027.160
2	07	04												64.877.500	81.877.500
	PROG RAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
2	07	04	2,01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota									25.000.000	25.000.000
2	07	04	2,01	02	Pelayanan antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL			40%	100 Orang			25.000.000	120 Orang 25.000.000
2	07	04	2,03 P	engel	olaan Informasi Pasar Kerja									29.607.500	29.607.500
2	07	04	2,03	03	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			40%	50 Orang			29.607.500	50 Orang 29.607.500
2	07	04	2,04	Pelind	ungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota									10.270.000	27.270.000
2	07	04	2,04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya			40%	150 Orang			10.270.000	250 Orang 27.270.000

2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							56.998.620		61.531.695		
2	07	05	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							23.335.725		24.502.511		
2	07	05	2,01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			9,41%	2 Perusahaan	23.335.725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Perusahaan	24.502.511
2	07	05	2,02	enceg	ahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							33.662.895		37.029.184		
2	07	05	2,02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah			9,41%	6 Perkara	33.662.895	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Perkara	37.029.184
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	32	URUSAN			PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							4.900.806.489		5.005.524.460		
3	32	01	PROGRAM		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4.782.286.807		4.833.437.091		
3	32	01	2,01	Perenca	naan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							32.890.882		34.535.475		
3	32	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	6.299.947	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.614.994
3	32	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Dokumen	26.590.935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	27.920.481
3	32	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.759.282.150		3.759.282.150			
3	32	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bul	3.759.282.150			12 Orang/bul	3.759.282.150
3	32	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							207.463.935		217.837.133			
3	32	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.832.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	28.174.388
3	32	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.825.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	42.866.964

3	32	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		10.103.835	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	10.609.027
3	32	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan		129.701.670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14 Laporan	136.186.754
3	32	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							722.861.790					759.004.880	
3	32	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan		3.208.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	3.369.240
3	32	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		178.865.190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	187.808.450
3	32	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan		540.787.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	567.827.190
3	32	01	2.09	Pemeliharaan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							59.788.050					62.777.453	
3	32	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit		23.967.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Unit	25.165.665
3	32	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit		15.293.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Unit	16.057.913
3	32	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		20.527.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	21.553.875
3	32	03	PROG		RAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							29.570.510					57.962.996	
3	32	03	2.01	Penataa	n Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							29.570.510					57.962.996	

3 32 03 2.01 02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran		Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)			0 Dokumen		29.570.510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	57.962.996
3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI							88.949.172				114.124.373
3 32 04 2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian							88.949.172				114.124.373
3 32 04 2.01 01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina		14,29%	150 Kepala Keluarga		38.677.733	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Kepala Keluarga	47.829.910
3 32 04 2.01 02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman		Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan		14,29%	1 Satuan Permukiman		50.271.439	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Satuan Permukiman	66.294.463
TOTAL								5.210.753.989				5.345.960.815

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (out come) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2023 berisi program kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai kewenangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2023 yang telah disajikan pada tabel 3.3, penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan, selain itu disajikan pula usulan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Pusat dengan mengharapkan bantuan alokasi dana dari APBD I dan APBN/DAK 2024.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang diaplikasikan melalui berbagai program dan kegiatan akan dilaksanakan merupakan upaya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Nunukan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada RENSTRA Perubahan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengusulkan 7 program yang terbagi menjadi 13 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Dari usulan tersebut, diharapkan memperoleh alokasi pagu anggaran sesuai dengan yang telah direncanakan dan diusulkan kepada tim anggaran. Apabila pagu anggaran yang diperoleh tidak mencukupi untuk mengakomodir semua usulan, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja akan memprioritaskan kegiatan yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan juga yang mendukung program Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Disamping itu, dokumen perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan harapan agar dapat mengakomodir segenap aspirasi stakeholders terutama masyarakat yang mengajukan usulan kegiatan pembangunan melalui MUSRENBANG.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Tahun 2024 ini dapat direalisasikan sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat diwujudkan.

Nunukan, 20 Februari 2023
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Nunukan



ABDUL MUNIR, ST, M.A.P
NIP. 19721130 200003 1 002